

Media Online	Muria.suaramerdeka.com
Tanggal	05 Mei 2025
Wilayah	Kabupaten Rembang



Waduh, Defisit Anggaran di APBD Rembang 2025 Sudah Mencapai Rp 239 Miliar

<https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/0715087288/waduh-defisit-anggaran-di-apbd-rembang-2025-sudah-mencapai-rp-239-miliar>

REMBANG, suaramerdeka-muria.com – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Rembang hingga bulan April ini sudah mencapai defisit atau kekurangan lebih Rp 239 miliar lebih.

Hal ini diketahui saat DPRD Kabupaten Rembang menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2025.

Ketua Komisi IV, Ilyas mengatakan defisit Rp 239 miliar itu disebabkan belum terselesaikannya tunggakan-tunggakan hingga anggaran wajib yang belum diselesaikan oleh Pemkab di masa sebelumnya.

Bahkan belum selesainya tunggakan itu juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kekurangan Rp 239 miliar itu juga ada di temuan BPK tahun anggaran sebelumnya hingga anggaran wajib 2025 yang belum dianggarkan. Terutama dari Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelas dia.

Dia mencontohkan anggaran yang belum masuk ke APBD tahun 2025 seperti kekurangan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), honor Tenaga Harian Lepas (THL), bantuan kesejahteraan untuk guru PAUD, SD, SLTP hingga insentif tenaga kesehatan selama masa Covid-19.

"Kekurangan Rp 239 miliar ini harus segera dicarikan solusinya," kata dia.

Dari beberapa sumber di DPRD, kekurangan APBD untuk TPP mencapai Rp 66 miliar, honor THL mencapai kurang lebih Rp 30 miliar, DAK hingga Rp 14 miliar, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sebesar Rp 4 miliar, kekurangan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp 22 miliar lebih hingga honor guru madrasah diniyah senilai Rp 13 miliar.

Ilyas menambahkan apabila tidak segera ada solusi atas defisit Rp 239 miliar itu, keuangan daerah akan tidak sehat.

"Karenanya DPRD dalam RKPD Perubahan APBD ini berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan kekurangan Rp 239 miliar itu. Kalau tidak segera di selesaikan, keuangan daerah akan selalu tidak sehat di masa mendatang," terang dia.

Pembahasan RKPD Perubahan APBD 2025 itu berlangsung sejak Jumat lalu.

Tak hanya saat jam kerja, pembahasan RKPD Perubahan APBD 2025 berlangsung hingga dini hari.

Bahkan pada hari Minggu kemarin, anggota DPRD dan TAPD masih melakukan pembahasan.

Namun DPRD mengaku masih belum menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan defisit Rp 239 miliar itu.

"Kalau Rp 20-30 miliar mudah saja untuk mencari solusinya. Ini sudah sampai Rp 239 miliar lebih. Jadi agak sulit untuk mencari solusi menyelesaikan kekurangan APBD ini," kata Puji Santosa, salah satu anggota DPRD.